



Proyek Puskesmas Kedondong Telat

# Didenda Rp5 Juta per Hari

**KETAPANG** - Memasuki hari ke delapan masa perpanjangan waktu, pengerjaan proyek pembangunan renovasi Puskesmas Kedondong, Kecamatan Delta Pawan belum selesai 100 persen. Sedangkan waktu perpanjangan tersisa tinggal empat hari dari batas waktu 12 hari penyelesaian.

Berdasarkan kontrak, harusnya proyek senilai Rp4,8 miliar oleh CV. Jaya Lak-sana Putra itu berakhir 8 Desember 2019

kemarin. Atas keterlambatan itu, pelaksana diberikan sanksi denda mencapai Rp5 juta perhari selama perpanjangan waktu.

PPTK Proyek Pembangunan Puskesmas Kedondong, Ferdinan, mengatakan pekerjaan renovasi Puskesmas hingga hari ini belum selesai dikerjakan. Menurutnya, pekerjaan akan selesai pada

◆ Ke Halaman 19 Kolom 1

## Didenda Rp5 Juta per Hari

**Sambungan dari halaman 17**

Rabu (18/12) mendatang. "Pekerjaan belum selesai. Kata mereka Rabu akan selesai 100 persen," kata Ferdinan, kemarin (16/12).

Dia menjelaskan, perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan proyek tersebut selama 12 hari. Pada masa itu, pelaksana dikenakan sanksi denda dan sudah mulai diterapkan tanggal 9 Desember 2019 lalu. "Sampai saat ini denda yang dikenakan sudah memasuki hari ke delapan. Pemotongan denda sendiri dilakukan ketika pekerjaan selesai dan disetor lebih

dulu. Uang denda masuk ke kas daerah," jelasnya.

Dia berharap, sisa waktu yang tersisa beberapa hari di masa perpanjangan dapat dimanfaatkan pelaksana secara maksimal. Lantaran pelaksana akan merugi jika penyelesaian terus berlarut-larut.

Wakil Ketua DPRD Ketapang, Mathoji, mendorong pelaksana, khususnya yang mendapat tambahan waktu segera menuntaskan pekerjaan. Dia mendesak pelaksana harus bertanggung jawab penuh sebagai pemenang lelang. "Pemerintah sudah menganggarkan miliaran untuk proyek itu.

Oleh karena itu pelaksana harus memanfaatkan waktu yang ditoleransi PPK secara maksimal dalam penyelesaiannya, sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat," ungkapnya.

Dia menyarankan, saat ini yang harus jadi fokus pelaksana adalah penuntasan pekerjaan dengan kualitas baik. Namun demikian, dia juga menyoroti perusahaan agar tidak mengulangi keterlambatan penyelesaian pekerjaan jika masih mendapat kepercayaan pemerintah. "Tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak tentu harus jadi pelajaran. Memang se-

cara aturan, perpanjangan waktu sah-sah saja, namun akan jadi penilaian kurang baik untuk perusahaan," lanjutnya.

Kedepan, dia berharap pemerintah daerah atau pihak yang menangani proses lelang lebih jeli melihat rekam jejak perusahaan yang mengikuti tender di Ketapang. Tujuannya agar kejadian keterlambatan pekerjaan tidak terulang lagi. "Jika perusahaan yang saat ini tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, kedepan agar jadi evaluasi apabila perusahaan itu kembali ikut lelang," pungkasnya. (afi)